

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PENGEMBANGAN  
KEWIRAUSAHAAN TERPADU (PKT) DI KECAMATAN JATINEGARA KOTA  
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

Achmad Ghana Narang  
30.0487

*Asdaf Kota Administrasi Jakarta timur, Provinsi DKI Jakarta  
Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat  
Email: [ghananarang14@gmail.com](mailto:ghananarang14@gmail.com)*

Pembimbing Skripsi: Heru Sulistiyo, S.Sos, M.Si

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** Community empowerment is a strategy used to give authority to communities to improve their standard of living. The purpose of empowerment is to improve welfare. To achieve this, the government has developed an Integrated Entrepreneurship Program (PKT) which is run by the Department of Trade, Industry, Cooperatives, Small and Medium Enterprises and implemented in every district. The PKT program is run by 7 related agencies that are responsible for implementing the PKT program. The Regional Apparatuses in Jatinegara District are the supporters of the implementation of the PKT program. **Purpose:** This study aims to analyze the implementation of the PKT program and also the inhibiting and supporting factors of the implementation of the PKT program. **Method:** This research uses a descriptive qualitative research method using an inductive approach. Retrieval of data sources in this study using the method of observation, interviews, and documentation. **Results/Findings:** The results of this study prove that the PKT program fulfills eight indicators, namely the PKT program can increase entrepreneurial potential, increase the number of entrepreneurs, increase productivity and high competitiveness, can facilitate all facilities and infrastructure and get support from regional officials and has other follow-up plans. **Conclusion:** The strategy for dealing with obstacles is by adding PKT program assistants to the PKT program development post, increasing the attractiveness of the program so that it is in demand by the community, increasing access to capital so that it is right on target, and generating ideas for innovative environmental activities. **Keywords: Community Empowerment, Integrated Entrepreneurship Development Program, Welfare**

**ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Pemberdayaan masyarakat adalah strategi yang digunakan untuk memberikan otoritas kepada masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Tujuan dari pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah mengembangkan Program Kewirausahaan Terpadu (PKT) yang dijalankan oleh Suku Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan dilaksanakan di setiap kecamatan. Program PKT dijalankan oleh 7 dinas terkait yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program PKT. Perangkat Daerah di Kecamatan Jatinegara adalah sebagai pendukung dari pelaksanaan program PKT. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan program PKT dan juga faktor penghambat dan pendukung dari pelaksanaan program PKT. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode

penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif. Pengambilan sumber data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini membuktikan program PKT memenuhi delapan indikator yaitu program PKT dapat meningkatkan potensi kewirausahaan, meningkatkan jumlah wirasaha, meningkatkan produktifitas dan daya saing yang tinggi, dapat memfasilitasi seluruh sarana dan prasarana dan mendapat dukungan dari perangkat daerah serta memiliki rencana lanjutan lainnya. **Kesimpulan:** Adapun strategi dalam menghadapi hambatan yaitu dengan menambahkan pendamping program PKT pada pos pengembangan program PKT, meningkatkan daya tarik program agar diminati masyarakat, meningkatkan akses pemodalan agar tepat sasaran, dan memunculkan ide kegiatan lingkungan yang inovatif.

**Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, Kesejahteraan**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Adapun dalam fungsi pengaturan, diatur dalam Peraturan Gubernur No. 2 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan terpadu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat program yakni Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang biasa disingkat (PKT). Yang mana program ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam mengembangkan potensi yang ada pada masyarakat baik dalam keterampilan maupun kemandirian yang berkolaborasi antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dunia usaha, pendidikan, ataupun pihak Lembaga dan lainnya. Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) ini memiliki tujuan agar pemerintah dapat meningkatkan ekonomi kreatif serta menumbuhkembangkan potensi Kewirausahaan dengan mendorong serta memfasilitasi penciptaan Wirausaha di Provinsi DKI Jakarta sehingga dengan ini dapat menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di wilayah Provinsi DKI Jakarta. (*Mengenal Jakpreneur, Program Untuk Pengembangan Kewirausahaan / Kumparan.Com, 2020*).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat kegiatan sosialisasi Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) ini dilakukan pada tingkat kelurahan-kelurahan yang ada di Jakarta. Sosialisasi yang dilakukan ini nantinya akan disampaikan kepada peserta sosialisasi yang nantinya juga akan disebarluaskan ke masyarakat luas diluar sana. Acara ini terdiri dari Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) dan kader PKK dan bukan hanya itu saja, warga yang sudah mempunyai usahapun turut ikut mengikuti acara sosialisasi ini yang diharapkan warga akan berwirausaha untuk mengikuti pelatihan dan setelah itu dibantu pengurusannya dalam hal perizinan dan bantuan permodalan.

Kecamatan Jatinegara merupakan kecamatan yang strategis dan potensial dijadikan sebagai lokasi berwirausaha bagi masyarakat yang tinggal di lokasi tersebut dan salah satu kecamatan yang ada di Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta yang dijadikan tempat pelaksanaan Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT). Pelaksanaan yang dilakukan di Kecamatan Jatinegara pada program PKT ini dibina oleh Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur. Meningkatkan semangat dan motivasi para wirausaha merupakan pembinaan awal yang dilakukan dan itu yang diharapkan oleh pemerintah.

## 1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Banyaknya persoalan yang terjadi di setiap daerah di Indonesia, membuat pemerintahan daerah harus bisa mengambil kebijakannya sendiri untuk kemajuan wilayah masing-masing. Salah satu aspek masalah yang selalu terjadi di setiap wilayah adalah kemiskinan.

Kemiskinan yang terjadi di Indonesia tidak hanya terjadi di daerah ataupun pedesaan, melainkan kota-kota besar pun ikut serta. Salah satu contohnya adalah provinsi DKI Jakarta yang mempunyai masalah mengenai kemiskinan dan pemerataan distribusi yang sampai saat ini belum terpecahkan. Penduduk Jakarta yang semakin banyak karena adanya arus migrasi masuk ke Jakarta yang lebih besar dengan yang keluar Jakarta. Hal ini membuat sumber masalah besar yang ada di Jakarta. Para pendatang pun yang datang ke Jakarta tidak semuanya memiliki keahlian maupun keterampilan yang khusus dibidangnya yang bisa dijadikan modal, itu yang membuat mereka lebih cenderung tidak memiliki modal untuk tetap hidup yang layak di hiruk-pikuknya Jakarta ini. (*statistik.jakarta.co.id*)

Adanya kemiskinan di Jakarta sampai saat ini masih bisa berada di persentase angka tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa angka kemiskinan di Jakarta pada masa pandemi 2021 mencapai 4,72% dan merupakan angka tertinggi dalam 20 tahun terakhir.

**Gambar 1. 1**  
**Persentase Jumlah Penduduk Miskin DKI Jakarta**



Sumber: (BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022)

Adapun berkurangnya data penduduk dalam klasifikasi miskin ini disebabkan oleh peningkatan daya beli masyarakat karena naiknya pendapatan secara umum. Disamping itu, peran dari pemerintah DKI Jakarta dalam menjaga stabilitas barang juga menjadi alasan penurunan angka kemiskinan itu terjadi. Walaupun pelan tapi ini menunjukkan bahwa Jakarta membaik dan menunjukkan perubahan positif, jika dibandingkan dengan bulan Maret 2021, persentase penduduk miskin pada pengambilan data terakhir September 2021 berkurang sebanyak 0,05% atau berkurang 3.630 orang. (*BPS Provinsi DKI Jakarta, 2022*)

Berkaitan dengan hal ini, pemerintah provinsi DKI Jakarta sedang menjalankan salah satu fungsi pemerintah yakni pemberdayaan. Dengan menciptakan program yang sudah dirancang dan direncanakan guna mengatasi permasalahan yang ada seperti kemiskinan, pengangguran, maupun pemerataan distribusi di DKI Jakarta. Hal ini sudah diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta tahun 2017-2022.

Maka dari itu Program PKT ini dibuat dan dalam pelaksanaannya ada 7 dinas yang ikut serta dalam pelaksanaan program ini, yaitu Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan; Dinas Pemberdayaan Anak dan Pengendalian Penduduk; Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi; Dinas Sosial; Dinas Perindustrian dan Energi; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Kelautan dan Pertanian Pemprov DKI Jakarta. Program PKT juga memiliki tujuan lain yaitu menjadi platform yang berkolaborasi dengan berbagai aspek kewirausahaan. Dan dilihat dari segi pemasaran program ini bekerja sama dengan e-commerce yang ada di Indonesia. Dari segi permodalan program ini bekerja sama dengan aplikator dan bank penyalur kredit.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian pertama yang menjadi referensi peneliti merupakan penelitian oleh Novita Wahyu Setyawati (Jurnal,2019) yang berjudul “Kajian Pengembangan Kewirausahaan pada Kawasan Transmigrasi”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji implementasi pengembangan kewirausahaan di Kawasan Transmigrasi serta mengidentifikasi hambatan pengembangan tersebut. Hasil penelitiannya yaitu pengembangan kewirausahaan di Kawasan Transmigrasi masih kurang juga usaha wirausaha di kawasan transmigrasi dilakukan sesuai dengan jenis usaha, antara lain pembentukan kelompok berbasis komoditas, pemilihan pendamping yang lebih berkualitas, program mediasi sektoral, dan pelaksanaan program pelatihan. Penelitian kedua yang menjadi referensi penulis adalah dari Nurina (Jurnal,2020) yang berjudul “Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) di DKI Jakarta”. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) di DKI Jakarta dapat meningkatkan kapasitas mitra binaan untuk mendongkrak output kinerja usahanya sehingga dapat bersaing dalam pasar terbuka yang akan dihadapinya serta diharapkan juga dapat meningkatkan output dengan predikat unggul dan mandiri secara otomatis diharapkan juga agar pembayaran pinjaman tetap dilakukan tepat waktu. Hasil penelitian yang didapat bahwasannya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki fungsi yang signifikan dan berpotensi untuk berperan dalam pembangunan ekonomi nasional dan sektoral di Indonesia dan dalam program kemitraan mampu mewarakan wawasan bisnis dan inspirasi bisnis dan inspirasi bisnis yang dikomunikasikan secara berkala melalui kegiatan pemantauan. Penelitian ketiga yang menjadi referensi penulis adalah dari Winiatin Khamimah (Jurnal,2021) yang berjudul “Peran Kewirausahaan Dalam Memajukan Perekonomian Indonesia”. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan sudut pandang baru tentang kajian kewirausahaan dan bagaimana hubungannya dengan perkembangan ekonomi Indonesia juga memberikan bahan evaluasi kepada pemangku kepentingan agar Kewirausahaan dapat memberikan sumbangsih bagi kemajuan perekonomian Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kewirausahaan berperan dalam mendukung kegiatan ekonomi rumah tangga lokal, bisnis daerah, dan badan usaha milik negara dalam usaha ekonomi serta dinamika operasi komersial ini dapat mendorong ekspansi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan manusia.

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pemberdayaan masyarakat melalui program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) di Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur. Penulis meneliti di lokus yang berbeda dan menggunakan teori yang berbeda dari penelitian sebelumnya yaitu Teori Mardikanto (2015) dengan 4 (empat) indicator antara lain: 1) Bina Manusia; 2) Bina Usaha; 3) Bina Lingkungan; dan 4) Bina Kelembagaan.

### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) di Kecamatan Jatinegara dan Menganalisis faktor penghambat dan pendukung

serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dari Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) di Kecamatan Jatinegara.

## **II. METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pemberdayaan yang dikemukakan oleh Mardikanto (2015) yang terdiri dari 4 (empat) indikator antara lain adalah bina manusia, bina lembaga, bina lingkungan, dan bina kelembagaan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, observasi dan wawancara. Informan yang di wawancarai adalah Camat Kecamatan Jatinegara, Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kecamatan Jatinegara, Unsur Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Satuan Pelatihan UKM dan UMKM Kecamatan Jatinegara serta Masyarakat yang menjadi anggota dari program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) termasuk Wirausaha Pencari Kerja, Wirausaha Pemula, dan Wirausaha Naik Kelas.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Hasil Penelitian**

#### **3.1.1 Pelaksanaan Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) di Kecamatan Jatinegara Kota Administrasi Jakarta Timur**

Menurut pengamatan penulis yang dilaksanakan di Kecamatan Jatinegara pelaksanaan pemberdayaan masyarakat diselenggarakan oleh Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Timur dengan mengirimkan Kepala Satuan Pelaksana dan sejumlah pendamping di Kecamatan Jatinegara. Salah satunya pos pengembangan program PKT ini berada di Kecamatan Jatinegara. Kepala Satuan Pelaksananya (Kasatpel) bernama Bapak Tarmad. Pendamping di Kecamatan Jatinegara yang turun langsung ke kecamatan ada sejumlah 8 orang. Proses 7P yaitu perekrutan, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan. keuangan, dan perbantuan modal digunakan untuk menjalankan program PKT. Wirausaha Pemula dan Wirausaha Naik Kelas merupakan tujuan yang direncanakan dalam pelaksanaan program PKT. Program 7P yang telah direncanakan dan dipilih adalah dimana program PKT mulai dilaksanakan, khususnya bagi para pemilik usaha baru. Dan untuk wirausaha naik kelas mereka dapat memilih program sesuai dengan kebutuhan untuk memajukan usahanya. Pelaksanaan program 7P dalam program PKT adalah sebagai berikut:

##### **A. Perekrutan**

Pendamping melakukan perekrutan dengan *door to door* dan online kepada pihak yang menjadi sasaran. Sebelum pendamping melakukan perekrutan, mereka melakukan sosialisasi terlebih dahulu bersama dengan RW dan RT. Sosialisasi dilakukan pada kegiatan dimana banyak penduduk setempat berkumpul seperti acara sosial, arisan, dan lain sebagainya.

##### **B. Pelatihan**

Peserta program PKT dilatih setelah rekrutmen. Pelatihan hard skill dan soft skill merupakan modalitas pelatihan yang tersedia. Menanamkan nilai-nilai kewirausahaan, belajar mengelola pemasaran dan pengemasan, dan topik lainnya adalah contoh pelatihan soft skill. Pelatihan hard skill berbentuk instruksi praktis; misalnya, di bidang makanan, kelas memasak diajarkan dengan menggunakan menu yang telah ditentukan. Ada instruksi menjahit dan hal-hal lain di industri konveksi.

##### **C. Pendampingan**

Masuk fase pendampingan setelah fase pelatihan. Peserta program PKT sudah memiliki produk sendiri pada tahap pendampingan ini. Produk peserta yang sudah memiliki BPOM, MUI Halal, dan sertifikasi lainnya akan mendapatkan pendampingan untuk mendapatkan sertifikasi tersebut. Selain itu, pendamping akan memfasilitasi bantuan untuk situs e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya setelah lolos proses sertifikasi.

#### **D. Perizinan**

Pada tahap perijinan fasilitator mendampingi peserta dalam pengurusan perizinan seperti membuat surat rekomendasi penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK). Perizinan merupakan hal yang penting dalam suatu usaha. Landasan sebuah bisnis adalah perizinan, dan perizinan adalah tanda bisnis yang sukses. Oleh karena itu, program PKT yang diselenggarakan Sudin PPKUKM bertujuan untuk memudahkan peserta program mendapatkan izin.

#### **E. Pemasaran**

Strategi pemasaran bisnis sangat penting. Tanpa pemasaran, target perusahaan dianggap tidak ada. Telah dibuktikan bahwa bisnis dapat berhasil tanpa bergantung pada pendapatan pemasaran. Pada tahap ini pendamping memberikan pengetahuan tentang taktik pemasaran, mulai dari sisi periklanan hingga komponen kemasan produk yang menarik minat konsumen untuk membeli barang yang disediakan.

#### **F. Pelaporan Keuangan**

Level pelaporan keuangan adalah dimana edukasi keuangan yaitu bagaimana mengatur pemasukan dan pengeluaran dengan baik. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran keuangan perusahaan atau bisnis yang sebenarnya.

Pendamping melakukan edukasi dengan memperkenalkan aplikasi laporan keuangan yaitu “Si Apik” yang dikembangkan oleh Bank Indonesia. Melalui aplikasi ini perhitungan pelaporan keuangan akan menjadi mudah, efektif, dan efisien. Aplikasi ini juga dapat di unduh di smartphone masing-masing. Tentunya hal ini akan menjadi sangat mudah karena manusia zaman sekarang tidak bisa lepas dari ponsel yang dia miliki.

#### **G. Permodalan**

Permodalan adalah salah satu tahap yang berkaitan dengan modal. Dengan mematuhi berbagai syarat dan ketentuan, peserta atau pengusaha akan dibantu dengan memberikan pembiayaan sesuai dengan kebutuhan usahanya. Dengan lembaga lain seperti Bank Indonesia, Bank DKI, dan lembaga pendidikan di DKI Jakarta, bantuan modal ini juga bekerja secara kemitraan.

### **3.1.2 Faktor Penghambat dalam Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) di Kecamatan Jatinegara**

Faktor yang menghambat proses pelaksanaan program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di Kecamatan Jatinegara yaitu pandemi COVID-19. Hal ini dikarenakan segala kegiatan dibatasi dan harus sesuai dengan protokol kesehatan. Dengan adanya pembatasan ini tentunya menghambat pencapaian dari tujuan program PKT. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan ada beberapa faktor yang memperlambat jalannya program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu di wilayah Kecamatan Jatinegara:

#### **1. Adanya penurunan semangat pelaku usaha**

Menurut pengamatan penulis, semangat dan pola pikir para pengusaha binaan PKT sudah mulai berkurang. Masih ada ketidakpastian dan gejolak datang dari mereka yang bahkan hanya ingin menjadi pengusaha potensial yang membutuhkan pendampingan PKT.

#### **2. Adanya kesulitan dalam mendapatkan perizinan BPOM**

Perizinan usaha yang diberikan dari PKT dinilai berjalan dengan lancar, Pada umumnya setiap pemilik usaha binaan PKT di Kecamatan Jatinegara memiliki izin usaha yang masih berlaku. Namun, tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan penunjukan BPOM untuk produk mereka.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan Bapak Irvan selaku Pendamping PKT Kecamatan Jatinegara dengan penulis:

Padahal, perizinan BPOM lebih kompleks daripada perizinan MUI dan memakan banyak biaya karena kru survei mengunjungi fasilitas manufaktur untuk melakukan survei. Syarat dan ketentuan dari BPOM tertera pada label. Pelabelan BPOM diminati masyarakat untuk memperluas pasar dan niaga produk yang mereka produksi.

Pelabelan BPOM bisa dibilang tidak mudah hal ini dikarenakan adanya syarat dan ketentuan yang rumit. Dari segi air yang digunakan, kebersihan, protokol kesehatan pada pandemi ini, dan lainnya.

### **3. Akses permodalan yang disalahgunakan**

Menurut pengamatan dan wawancara penulis, ada anggota program PKT yang tidak jujur yang hanya mencari modal, yang pasti menimbulkan tantangan terhadap pelaksanaan PKT. Menurut Pak Irvan, Pendamping PKT Kecamatan Jatinegara, agar usaha yang baru mendaftar untuk mendapatkan bantuan permodalan dapat memenuhi syarat, terlebih dahulu harus diverifikasi kelayakannya. Untuk memastikan itu benar-benar aktual dan beroperasi, masih perlu dipilih dan diperiksa. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Bapak Irfan sebagai Pendamping PKT Kecamatan Jatinegara:

Dalam pembagian modal ada oknum pelaku usaha yang tidak memiliki usaha dan seolah-olah dia memiliki usaha demi mendapatkan perbantuan modal. Hal ini dibuktikan dengan adanya survey kunjungan ke tempat usaha tersebut, usaha dari oknum tersebut tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebuah usaha, hal ini menjadi masalah yang mengganggu untuk saya dalam penyelenggaraan PKT di Kecamatan Jatinegara.

### **4. Berdiri di masa pandemi Covid-19**

Para peserta program PKT masih terpaksa dalam situasi pandemi Covid-19 ini menyebabkan usahanya belum bisa berkembang. Menurut temuan wawancara dengan salah satu pengusaha binaan PKT, bisnis telah maju dengan memberikan kesempatan kerja kepada orang luar yang tidak memiliki pekerjaan atau menganggur. Namun, kemajuan yang telah dicapai akhirnya melambat dan terhenti karena kekhawatiran terkait pandemi ini. Karena wirausaha memilih strategi yang beragam, hal ini tidak dapat dihindari.

### **3.1.3 Faktor Pendukung dalam Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) di Kecamatan Jatinegara**

Dibalik faktor hambatan yang dimiliki oleh program PKT adapun faktor pendukung berjalannya program PKT ini. Hambatan yang berasal dari masyarakat maupun dari pelaksana program itu sendiri dihadapi dengan faktor pendukung yang telah disiapkan oleh Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Timur. Faktor pendukung ini diciptakan agar pelaksanaan program PKT khususnya Kecamatan Jatinegara dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Adapun beberapa faktor pendukung jalannya program PKT ini:

#### **1. Para pendamping program PKT memiliki inovasi dan pengalaman dalam menghadapi permasalahan di lapangan**

Di Kecamatan Jatinegara, pendamping program PKT diharapkan memiliki kemampuan akademik yang kuat. Mereka tidak hanya memiliki pendidikan dan pelatihan pendamping, tetapi mereka juga memiliki pengalaman kerja dengan UMKM dan UKM, atau yang dikenal dengan dunia usaha. Suku Dinas PPKUKM Jakarta Timur melakukan seleksi pendamping yang langsung terjun ke daerah, khususnya Kecamatan Jatinegara.

#### **2. Program PKT Memiliki Jaringan yang Luas**

Jejaring yang luas tentunya diperlukan untuk pelaksanaan PKT agar berhasil menyelesaikan 7P, atau 7 tahapan program yang telah direncanakan. Inisiatif PKT bertujuan untuk memajukan UMKM, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menurunkan angka pengangguran. Para perancang program PKT menjalin kerjasama antar lembaga untuk mewujudkan tujuan tersebut. Di Indonesia, kolaborasi dilakukan melalui penggunaan e-commerce dan Lembaga pemerintah.

#### **3. Program PKT memanfaatkan Teknologi Sebagai Sarana dan Prasarana Bagi Para Peserta Program PKT.**

Pemanfaatan teknologi modern memiliki dampak yang signifikan terhadap kemampuan program PKT untuk berhasil dilaksanakan. Bazaar Online, semacam wadah bagi peserta

program PKT secara online, adalah salah satu programnya. Tujuan pelaksanaan program ini adalah agar anggota program PKT dapat mengiklankan barangnya dengan tetap mematuhi peraturan keselamatan.

### **3.2 Pembahasan**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Mardikanto dan Soebianto (2015) yang mana terdapat 4 (empat) indikator antara lain adalah bina manusia, bina lembaga, bina lingkungan, dan bina kelembagaan.

Bina manusia memiliki tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Dalam mengembangkan sumber daya manusia Bina manusia diperlukan untuk memperkuat kemampuan dan keterampilan manusia itu sendiri. Dalam unsur Pendidikan, bina manusia yang dilakukan adalah dengan cara sosialisasi langsung kepada masyarakat mengenai tujuan wirausaha bagi unsur Pendidikan yaitu untuk mengembangkan serta membina bibit atau bakat pengusaha sehingga bibit tersebut lebih berbobot dan selalu mengikuti perkembangan ilmu yang mutakhir juga Pendidikan kewirausahaan menjadi manusia berwatak unggul, memberikan kemampuan untuk membersihkan sikap mental negative meningkatkan kemandirian masyarakat.

Potensi Kewirausahaan merupakan salah satu indikator dalam dimensi bina manusia. Menumbuh kembangkan potensi kewirausahaan dan menciptakan wirausaha merupakan salah satu tujuan pemerintah Provinsi DKI Jakarta menciptakan program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu. Pelaksanaan program PKT ini untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di DKI Jakarta. Dengan adanya program ini pemerintah menciptakan perubahan pola pikir masyarakat yaitu dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan suatu keluarga atau individu tidak hanya bekerja di perusahaan besar melainkan bisa juga untuk membuka usaha. Sedangkan Kemandirian Wirausaha merupakan salah satu hal yang penting. Apabila kemandirian wirausaha belum tercapai maka akan mudah suatu usaha jatuh. Sebagai contoh di masa pasca pandemi Covid-19 ini banyak usaha yang mudah jatuh karena memiliki ketergantungan dengan pihak yang lain. Apabila suatu usaha sudah mandiri maka dengan kondisi apapun suatu usaha dapat bertahan menghadapi banyak kendala dan tantangan.

Kemudian dalam Bina usaha memiliki manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi di suatu wilayah. Berdasarkan operasional yang ditentukan penulis dalam dimensi bina usaha terdapat 2 indikator yaitu produktivitas dan sarana prasarana.

Adapun produktivitas dan daya saing merupakan hal yang penting dalam suatu usaha. Produktivitas usaha di wilayah Kecamatan Jatinegara merupakan hal yang menjadi perhatian untuk pendamping di wilayah tersebut. Peningkatan produktivitas dan daya saing di Kecamatan Jatinegara dilaksanakan dengan adanya 7 tahapan yang ada terkhusus dalam bidang pelatihan. Pelatihan dibagi menjadi dua yaitu hard skill dan soft skill. Sedangkan Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dibutuhkan sarana dan prasarana pendukung. Sarana yang telah disediakan program PKT dalam memberdayakan masyarakatnya dimulai dari tempat, waktu, aplikasi, jejaring, dan lain sebagainya. Program PKT memiliki aplikasi e-order sebagai pemenuhan kebutuhan lembaga pemerintah. Sarana yang diberikan oleh program PKT berbentuk pada setiap tahapan yang ada dalam program tersebut.

Bina Lingkungan merupakan bina yang dilakukan untuk memelihara lingkungan dan menciptakan suatu kawasan yang strategis. Bina Lingkungan berperan dalam mendukung pemberdayaan sehingga menciptakan output yang berdaya saing dan berkompeten Bina lingkungan adalah faktor eksternal dalam pemberdayaan. Bina lingkungan merupakan dimensi dalam teori pemberdayaan. Dalam dimensi ini penulis menentukan 2 indikator yaitu kawasan strategis dan pengelolaan limbah. Kalau untuk kawasan strategis merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pemasaran suatu produk. Lokasi strategis untuk melakukan kegiatan ekonomi yaitu transaksi jual-beli tentunya akan mempengaruhi pendapatan yang didapatkan. Sedangkan Pengelolaan Limbah merupakan sisa atau sampah dari industri sebuah produk.



Dalam pengelolaan limbah produk program PKT belum memiliki kegiatan yang berkaitan dengan hal ini. Hal ini dikarenakan program PKT masih fokus kepada pembentukan usaha. Bina kelembagaan adalah yang mempengaruhi dari keberhasilan Bina Manusia, Bina Usaha dan Bina Lingkungan. Masyarakat membutuhkan sebuah penopang untuk melakukan proses kegiatannya oleh karena itu bina kelembagaan dapat menjadi penopang bagi pelaksanaan kegiatan masyarakat. Bina kelembagaan merupakan salah satu dimensi dalam teori pemberdayaan. Dalam dimensi ini penulis menentukan 2 indikator yaitu pengaruh kelembagaan dan program lanjutan.

Program PKT dipengaruhi oleh kelembagaan yang ada dalam suatu pos pengembangan. Tanpa adanya pengaruh lembaga dalam program ini tentunya tidak akan berjalan dengan baik.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Dalam program PKT dibutuhkan koordinasi antara Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Timur dengan Kecamatan Jatinegara. Hal ini dikarenakan penyelenggara dari program PKT ini adalah Suku Dinas PPKUKM Kota Administrasi Jakarta Timur dan Kecamatan Jatinegara adalah perangkat umum yang terkait. Kecamatan Jatinegara merupakan salah satu pos pengembangan dari program ini. Suku Dinas PPKUKM telah mengirimkan pendamping yang disesuaikan dengan kompetensi dan pengalaman kepada Kecamatan Jatinegara untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu.

Program PKT memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat. Program ini dilakukan agar dapat meningkatkan perekonomian terkhusus wilayah Kecamatan Jatinegara. Wakil Camat Jatinegara memiliki program lanjutan dari program PKT ini yang mempunyai nama Jatinegara Easy Service (JES). Program ini didesain sebagai platform yang dimanfaatkan untuk memperkenalkan seluruh produk yang ada di Kecamatan Jatinegara yang dilakukan dengan menyelenggarakan acara bazar serta pelayanan.

## **IV. KESIMPULAN**

Berikut kesimpulan yang dapat diambil dari penelaahan penulis terhadap program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menurunkan angka kemiskinan, dan menurunkan angka pengangguran dengan menggunakan 4 dimensi dan beberapa indikator, yakni dalam Bina Manusia, Program PKT dinilai sangat efektif dalam menumbuhkan potensi kewirausahaan dan mendorong munculnya wirausaha baru. Pencapaian jumlah pendaftaran yang telah diselesaikan berfungsi sebagai bukti dari hal ini. Perangkat Daerah mendukung program PKT dengan mengadakan pertemuan seperti musrenbang dan membantu mengembangkan wirausaha baru. Masyarakat tertarik mengikuti program PKT karena sosialisasi menarik yang dilakukan para pendamping program PKT.

Kemudian dalam Bina Usaha, semua langkah yang telah ditetapkan atau 7P tersebut dilaksanakan melalui program PKT yang dapat meningkatkan jumlah wirausaha yang mandiri, ulet, dan unggul. Pendamping program PKT dalam hal ini melakukan proses bertahap yang diawali dengan pendaftaran dan diakhiri dengan permodalan. Program PKT dinilai cukup berhasil mendongkrak jumlah wirausaha yang berkualitas. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yaitu penurunan semangat pelaku usaha, pelaksanaan pelatihan yang kurang efektif, kesulitan dalam perizinan BPOM, akses permodalan yang disalahgunakan, dan usaha peserta program PKT yang menjalani setelah pandemi Covid-19 dan faktor Pendukung dalam pelaksanaan program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu yaitu pendamping program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu merupakan seseorang yang inovatif dan pengalaman, program Pengembangan Kewirausahaan

Terpadu memiliki jaringan yang luas, dan program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu memaksimalkan penggunaan teknologi dalam memberdayakan masyarakat.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada beberapa rumah-rumah pelaku usaha serta di Kecamatan Jatinegara saja sebagai model kasus yang dipilih.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** Penulis menyadari masih awalnya teuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui program Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) di KEcamatan Jatinegara untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Allah SWT, kedua orang tua penulis, Unsur - unsur di Kecamatan Jatinegara termasuk para pendamping Program PKT, seluruh Civitas Akademika Institut Pemerintahan Dalam Negeri, segenap rekan seperjuangan penulis serta seluruh pihak yang membantu dan mendukung penulis dalam pelaksanaan penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Khamimah, W. (2021). Peran Kewirausahaan Dalam Memajukan Perekonomian Indonesia. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 228-240.

Mardikanto, T., & Sobieanto, P. (2015). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta.

Nurina. (2020). Pengembangan Kewirausahaan Terpadu (PKT) di DKI Jakarta. *Universitas Persada Indonesia YAI*, 8-20.

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, (2020).

Setyawati, N. W. (2019). Kajian Pengembangan Kewirausahaan pada Kawasan Transmigrasi. *Jurnal Marksipreneur*, 131-138.

Haryo, Y. (2020, 02 03). Retrieved from Mengenal Jakpreneur, Program untuk Pengembangan Kewirausahaan: <https://kumparan.com/yudhistira-nurresi/mengenal-jakpreneur-program-untuk-pengembangan-kewirausahaan-1sIOItB8qLS/1>

Kurniati, D. (2022, Januari 17). DDTCNews. Retrieved from BPS: Jumlah Penduduk Miskin September 2021 Capai 26,5 Juta Orang: <https://news.ddtc.co.id/bps-jumlah-penduduk-miskin-september-2021-capai-265-juta-orang-36166>

Statistik, B. P. (2022, 7 15). Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 turun menjadi 9,54 persen. Retrieved from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html>

